

Analisis Kompetensi Profesional Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: Studi Kasus pada Guru IPA SMP Negeri 35 Medan

**Cantika¹, Chana Ronada Silaban², Listhavia Febryana Simbolon³,
Ona Herpina Purba⁴, Rike Elisabet Limbong⁵**

1,2,3,4,5Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: cantikaahutauruk@gmail.com

Corresponding Author: Cantika

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kompetensi profesional guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses implementasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara semi terstruktur. Narasumber adalah seorang guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 35 Medan dengan pengalaman mengajar enam tahun yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru telah berupaya membangun kompetensi profesionalnya secara aktif melalui penerapan pendekatan inovatif seperti project-based learning dan discovery learning, penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang diawali asesmen diagnostik, serta pengintegrasian nilai Profil Pelajar Pancasila secara natural dalam pembelajaran. Namun demikian, terdapat delapan kendala utama yang masih dihadapi, yaitu kesulitan adaptasi terhadap kurikulum baru, pelatihan yang belum berbasis praktik, kesulitan penyusunan Modul Ajar, hambatan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, keterbatasan fasilitas inovatif, kesulitan menanamkan nilai Profil Pelajar Pancasila, beban administrasi yang tinggi, dan keterbatasan fasilitas pendukung. Kendala yang paling dominan adalah beban administrasi yang berlebihan dan minimnya pelatihan berbasis praktik. Dukungan pemerintah berupa penyederhanaan administrasi, peningkatan kualitas pelatihan yang lebih kontekstual, dan penyediaan fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi profesional guru secara optimal.

Kata Kunci: kompetensi profesional guru, Kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi, asesmen, Profil Pelajar Pancasila

ABSTRACT

This study aims to analyze teachers' professional competence in implementing the Merdeka Curriculum and identify the challenges encountered during the implementation process. A qualitative descriptive method was employed using semi-structured interviews. The informant is a science teacher at SMP Negeri 35 Medan with six years of teaching experience who has actively implemented the Merdeka Curriculum. The results indicate that the teacher has actively developed professional competence through innovative approaches such as project-based learning and discovery learning, differentiated instruction preceded by diagnostic assessment, and natural integration of Pancasila Student Profile values into learning activities. However, eight main challenges persist: difficulty adapting to the new curriculum, insufficient practice-based training, difficulty in developing Teaching Modules, barriers to implementing differentiated learning, method limitations due to inadequate facilities, challenges in instilling Pancasila Student Profile values, high administrative burden, and limited supporting facilities. The most dominant issues are administrative overload and insufficient practice-oriented training. Government support in the form of administrative simplification, improved training quality that is more

contextual and practice-based, and provision of adequate facilities is urgently needed for optimal development of teachers' professional competence.

Keywords: teacher professional competence, Merdeka Curriculum, differentiated learning, assessment, Pancasila Student Profile

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Dalam sistem pendidikan formal, guru menempati posisi yang paling sentral karena menjadi ujung tombak pelaksanaan pembelajaran yang secara langsung berinteraksi dengan peserta didik setiap harinya. Kualitas proses pembelajaran di kelas sangat bergantung pada kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif dan bermakna. Oleh sebab itu, kompetensi profesional guru menjadi faktor determinan yang tidak dapat diabaikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terdapat empat kompetensi yang wajib dimiliki setiap guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi profesional secara khusus didefinisikan sebagai kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru membimbing peserta didik mencapai standar kompetensi nasional. Suprihatiningrum (2013) mempertegas bahwa kompetensi profesional mencakup kemampuan menguasai materi ajar, struktur keilmuan, konsep, dan cara berpikir keilmuan secara menyeluruh, serta mampu menyusun pembelajaran sesuai tingkat perkembangan peserta didik.

Tuntutan terhadap kompetensi profesional guru semakin meningkat seiring dengan perubahan kebijakan kurikulum di Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Keputusan Nomor 56/M/2022 menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum pilihan yang dapat diimplementasikan secara bertahap oleh satuan pendidikan. Kurikulum Merdeka hadir sebagai respons atas berbagai tantangan pendidikan nasional, khususnya learning loss akibat pandemi COVID-19 dan rendahnya capaian literasi serta numerasi peserta didik Indonesia dalam penilaian internasional (Kemendikbudristek, 2022).

Kurikulum Merdeka membawa pergeseran paradigma yang fundamental dalam dunia pendidikan Indonesia. Dalam implementasinya, guru tidak lagi diberikan silabus yang lengkap dan terstruktur, melainkan dituntut secara mandiri menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), mengembangkan Modul Ajar yang kontekstual, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, melaksanakan asesmen yang autentik, serta mengintegrasikan nilai Profil Pelajar Pancasila ke dalam setiap kegiatan pembelajaran. Mulyasa (2013) menjelaskan bahwa paradigma baru ini mengutamakan penyederhanaan, fleksibilitas, dan fokus pada materi esensial serta penguatan karakter peserta didik.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan masih menghadapi hambatan yang signifikan. Rahman (2024) menjelaskan bahwa kompetensi profesional dalam konteks Kurikulum Merdeka diukur dari empat dimensi: penguasaan materi, pengelolaan materi, penerapan strategi, dan pengembangan diri. Keempat dimensi tersebut bersifat krusial mengingat kurikulum ini memberikan kebebasan penuh kepada guru dalam memilih materi, metode, dan penilaian. Alimuddin (2023) menemukan bahwa semakin tinggi kompetensi profesional guru, semakin sistematis, kontekstual, dan terintegrasi Modul Ajar yang dihasilkan.

Kondisi tersebut ditemukan secara nyata melalui pengamatan awal terhadap guru IPA di SMP Negeri 35 Medan yang dari 53 tenaga pendidik yang bertugas di sekolah tersebut, lima di antaranya mengajar mata pelajaran IPA. Guru yang menjadi subjek penelitian telah mengajar selama enam tahun dan menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang paling menantang yang pernah dijalaninya. Kesenjangan antara tuntutan ideal Kurikulum Merdeka dan realitas implementasinya di lapangan inilah yang melatarbelakangi penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kompetensi profesional guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka, dan (2) mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Narasumber dipilih secara purposif berdasarkan kriteria pengalaman langsung mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Profesional Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Temuan penelitian menunjukkan guru membangun kompetensi profesionalnya secara aktif dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Guru menyadari adanya perbedaan paradigma yang signifikan antara Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013, khususnya terkait fleksibilitas perancangan pembelajaran. Guru menyatakan bahwa perbedaan paling terasa terletak pada fleksibilitas perencanaan, di mana pada Kurikulum 2013 guru lebih terikat pada silabus dan RPP yang sangat terstruktur, sedangkan pada Kurikulum Merdeka guru menyusun sendiri Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar berdasarkan Capaian Pembelajaran yang lebih luas.

Dalam aspek perencanaan pembelajaran, guru menyusun Modul Ajar dengan mengombinasikan referensi dari Platform Merdeka Mengajar dengan adaptasi berbasis kebutuhan siswa di kelas. Guru tidak menggunakan modul secara mentah, melainkan memodifikasinya sesuai kondisi nyata di lapangan. Proses penyusunan satu Modul Ajar dari nol membutuhkan waktu tiga hingga lima jam, sementara adaptasi dari kerangka yang sudah ada memerlukan satu hingga dua jam. Temuan ini sejalan dengan kajian Alimuddin (2023) bahwa kualitas Modul Ajar sangat bergantung pada tingkat kompetensi profesional guru yang menyusunnya.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru menerapkan metode *project-based learning*, *discovery learning*, dan diskusi kelompok. Metode *project-based learning* dinilai paling efektif karena membuat siswa mengerjakan sesuatu yang nyata dan bermakna, bukan sekadar menghafal teori. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, guru melakukan asesmen diagnostik di awal semester guna memetakan kemampuan dan gaya belajar siswa, kemudian membagi siswa ke dalam kelompok kecil dengan pendekatan yang disesuaikan. Hal ini sejalan dengan Wulandari (2023) yang menegaskan bahwa kompetensi profesional yang kuat merupakan prasyarat utama keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi.

Integrasi Profil Pelajar Pancasila dilakukan secara natural dalam aktivitas pembelajaran. Dimensi gotong royong dikembangkan melalui kegiatan kelompok, sementara dimensi berpikir kritis dan bernalar didorong melalui diskusi kelas yang terstruktur. Guru lebih mengutamakan internalisasi nilai melalui pengalaman nyata daripada sekadar menghafalan istilah. Pengembangan kompetensi profesional dilakukan melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar mandiri, termasuk YouTube, Platform Merdeka Mengajar, grup diskusi sesama guru IPA, dan forum MGMP. Hal ini

sejalan dengan Saputra (2024) bahwa komunitas belajar merupakan cara paling efektif mengembangkan kompetensi profesional di era Kurikulum Merdeka.

Tabel 1. Kompetensi Profesional Guru IPA dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

No	Dimensi	Temuan Lapangan	Indikator
1	Penguasaan Materi dan Pola Pikir Keilmuan	Guru mampu menganalisis Capaian Pembelajaran IPA Fase D secara mandiri dan menurunkannya menjadi Alur Tujuan Pembelajaran yang logis. Guru tidak bergantung pada buku teks secara kaku dan memilih metode eksperimen dan eksplorasi yang selaras dengan hakikat sains sebagai proses ilmiah.	Penyusunan ATP mandiri, pemilihan metode berbasis discovery learning
2	Penguasaan Standar Kompetensi dan Capaian Pembelajaran	Guru berhasil beralih dari Kompetensi Dasar per kelas ke Capaian Pembelajaran per fase. Guru menerapkan asesmen diagnostik di awal semester untuk memetakan kesiapan belajar peserta didik sebelum memasuki materi inti.	Asesmen diagnostik, pemetaan kesiapan belajar, penahapan kompetensi per fase
3	Pengembangan Materi Secara Kreatif	Guru menggunakan project-based learning dan discovery learning. Guru pernah mencoba flipped classroom namun menyesuainya karena keterbatasan akses internet peserta didik, menunjukkan kemampuan adaptasi metode secara kontekstual.	Variasi metode kontekstual, kemampuan adaptasi sesuai kondisi peserta didik
4	Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan	Guru mengikuti 3-4 pelatihan resmi dan aktif belajar secara mandiri melalui YouTube, grup WhatsApp guru IPA, dan komunitas PMM. Guru menilai diskusi sejawat sebagai sumber belajar yang paling efektif.	Pelatihan formal dan informal, partisipasi komunitas belajar, refleksi diri
5	Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran	Guru mengintegrasikan TIK secara adaptif dan tidak memaksakan metode digital yang dapat menghambat inklusivitas belajar. Guru memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar sebagai referensi utama pengembangan perangkat.	Integrasi TIK adaptif, pemanfaatan PMM optimal

Sumber: Data Primer Hasil Wawancara, 2026

Kendala dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Temuan yang diperoleh melalui wawancara mendalam menunjukkan bahwa penelitian ini mengidentifikasi delapan kendala utama yang dihadapi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan kapasitas individual guru, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sistemik dan kelembagaan yang membentuk lingkungan implementasi kurikulum.

Pertama, kesulitan adaptasi terhadap kurikulum baru. Tuntutan Kurikulum Merdeka yang berbeda secara fundamental dari Kurikulum 2013 menyebabkan guru mengalami kebingungan pada fase awal penerapan. Kebebasan yang diberikan

kurikulum justru menjadi tantangan tersendiri karena guru perlu mengembangkan kemandirian dalam merancang pembelajaran dari nol. Kondisi ini berlangsung terutama pada tahun pertama implementasi ketika panduan dan pendampingan masih sangat terbatas.

Kedua, pelatihan yang belum berbasis praktik. Meskipun guru telah mengikuti tiga hingga empat kali pelatihan resmi dari dinas pendidikan dan sekolah, pelatihan tersebut dinilai lebih banyak membahas teori dan gambaran umum. Guru menyatakan masih perlu belajar mandiri secara intensif untuk menerapkan konsep di kelas karena simulasi dan studi kasus nyata sangat minim. Temuan ini mengkonfirmasi pendapat Uno (2022) bahwa profesionalisme harus terus dikembangkan dan tidak cukup hanya dengan pelatihan formal yang terputus dari realitas kelas.

Ketiga, kesulitan penyusunan Modul Ajar. Bagian paling menantang adalah merancang asesmen formatif dan komponen pembelajaran berdiferensiasi yang benar-benar mampu mengukur pemahaman siswa secara holistik. Guru mengalami kesulitan dalam merancang asesmen yang mampu mencerminkan perkembangan kompetensi secara nyata, bukan sekadar menghasilkan angka nilai administratif semata.

Keempat, hambatan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Menyiapkan bahan ajar dengan berbagai tingkat kesulitan untuk kelompok siswa yang berbeda memerlukan waktu dan energi yang sangat signifikan. Guru juga menghadapi tantangan dalam memberikan perhatian yang merata kepada seluruh peserta didik, terutama di kelas dengan jumlah siswa yang besar.

Kelima, keterbatasan fasilitas dalam penggunaan metode inovatif. Implementasi metode flipped classroom mengalami hambatan karena tidak semua siswa memiliki akses internet yang stabil di rumah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kompetensi profesional guru dalam menerapkan inovasi pembelajaran juga sangat dipengaruhi faktor eksternal berupa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Keenam, kesulitan menanamkan nilai Profil Pelajar Pancasila. Dimensi bernalar kritis dan mandiri merupakan aspek yang paling sulit ditanamkan karena siswa masih terbiasa dengan pola pembelajaran berbasis instruksi guru. Pembiasaan berpikir kritis dan kemandirian belajar memerlukan proses yang konsisten dan tidak dapat terbentuk secara instan dalam satu atau dua semester.

Ketujuh, beban administrasi yang tinggi. Ini merupakan kendala paling dominan yang dirasakan guru. Tuntutan untuk menyusun Modul Ajar, membuat berbagai jenis asesmen, mendokumentasikan perkembangan siswa, dan menyusun laporan pembelajaran secara paralel dengan kegiatan mengajar sangat menguras waktu dan energi. Akibatnya, perhatian yang seharusnya tercurah pada proses pembelajaran justru tersita oleh urusan administratif yang tidak selalu berkorelasi langsung dengan kualitas pembelajaran.

Kedelapan, keterbatasan fasilitas dan sistem pendukung. Implementasi Kurikulum Merdeka dinilai belum sepenuhnya didukung oleh fasilitas yang memadai. Guru mengungkapkan bahwa ekspektasi pemerintah terhadap pelaksanaan kurikulum cukup tinggi, sementara kondisi di lapangan belum sepenuhnya siap mendukung pelaksanaannya secara optimal. Tabel 2 berikut menyajikan ringkasan kedelapan kendala tersebut.

Tabel 2. Kendala Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

No	Kendala	Deskripsi	Sumber
1	Kesulitan Adaptasi	Tuntutan Kurikulum Merdeka yang berbeda dari Kurikulum 2013 menyebabkan guru mengalami kebingungan pada fase awal penerapan. Kebebasan yang diberikan kurikulum justru menjadi tantangan karena guru perlu mengembangkan kemandirian merancang pembelajaran.	Personal sistemik: minimnya pendampingan di masa transisi
2	Pelatihan Kurang Berbasis Praktik	Pelatihan yang diikuti guru lebih banyak bersifat teoritis dan gambaran umum. Guru masih perlu belajar mandiri secara intensif untuk menerapkan konsep di kelas karena simulasi dan studi kasus nyata sangat minim.	Kelembagaan: desain program pelatihan yang belum kontekstual
3	Kesulitan Penyusunan Modul Ajar	Bagian paling menantang adalah merancang asesmen formatif dan komponen pembelajaran berdiferensiasi yang mampu mengukur pemahaman siswa secara holistik, bukan sekadar menghasilkan angka nilai.	Teknis pedagogis: tuntutan diferensiasi tinggi tanpa dukungan memadai
4	Hambatan Pembelajaran Berdiferensiasi	Menyiapkan bahan ajar dengan berbagai tingkat kesulitan memerlukan waktu dan energi yang signifikan. Guru juga menghadapi tantangan memberikan perhatian yang merata kepada seluruh peserta didik di kelas besar.	Teknis: keterbatasan waktu dan rasio guru-siswa
5	Keterbatasan Fasilitas Inovatif	Implementasi metode flipped classroom gagal karena tidak semua siswa memiliki akses internet stabil di rumah. Ini menunjukkan kompetensi guru dipengaruhi faktor eksternal berupa sarana dan prasarana.	Infrastruktur: kesenjangan digital antara visi kurikulum dan realitas lapangan
6	Kesulitan Menanamkan Profil Pelajar Pancasila	Dimensi bernalar kritis dan mandiri paling sulit ditanamkan karena siswa masih terbiasa dengan pola pembelajaran berbasis instruksi. Pembiasaan memerlukan proses yang konsisten dan tidak dapat terbentuk secara instan.	Kultural: kebiasaan belajar pasif yang belum berubah
7	Beban Administrasi Tinggi	Tuntutan menyusun Modul Ajar, membuat berbagai jenis asesmen, mendokumentasikan perkembangan siswa, dan menyusun laporan secara paralel dengan mengajar sangat menguras waktu dan energi guru.	Sistemik: ekspektasi administrasi tidak sebanding sumber daya yang ada
8	Keterbatasan Fasilitas Pendukung	Implementasi Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya didukung fasilitas yang memadai. Ekspektasi pemerintah terhadap pelaksanaan kurikulum cukup tinggi, sementara kondisi lapangan belum sepenuhnya siap secara optimal.	Infrastruktur: kesenjangan antara kebijakan dan kondisi nyata sekolah

Sumber: Data Primer Hasil Wawancara, 2026

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kompetensi profesional guru merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Guru yang diteliti menunjukkan upaya pengembangan diri yang aktif dan proaktif melalui berbagai jalur baik formal maupun informal. Namun, hambatan sistemik berupa beban administrasi yang tinggi dan minimnya pelatihan berbasis praktik menjadi faktor pembatas yang signifikan dan tidak dapat diatasi oleh guru secara individual.

Temuan ini sejalan dengan Annisa (2024) yang menyatakan bahwa kompetensi profesional di era Kurikulum Merdeka diuji dari tingkat fleksibilitas dan kemandirian guru. Namun, fleksibilitas tersebut hanya dapat dioptimalkan apabila didukung oleh sistem yang kondusif dan memberikan ruang yang cukup bagi guru untuk berinovasi. Ketika guru harus menghadapi beban administrasi yang berlebihan, energi yang seharusnya digunakan untuk inovasi pembelajaran justru terkuras oleh pekerjaan administratif yang melelahkan.

Sanjaya (2021) menegaskan bahwa perencanaan pembelajaran yang baik merupakan prasyarat keberhasilan proses belajar mengajar. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, perencanaan yang baik membutuhkan waktu, kreativitas, dan kompetensi yang tinggi. Ketika guru tidak memiliki ruang dan waktu yang cukup karena tersita oleh administrasi, kualitas perencanaan pembelajaran pun turut terdampak secara negatif.

Keberhasilan Kurikulum Merdeka tidak semata bergantung pada kompetensi guru secara individual, tetapi juga pada kualitas dukungan sistemik yang diberikan oleh pemerintah dan institusi sekolah. Penyederhanaan administrasi, pelatihan berbasis praktik yang intensif, dan penyediaan fasilitas yang memadai merupakan prasyarat yang tidak dapat diabaikan jika implementasi Kurikulum Merdeka ingin berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Guru IPA di SMP Negeri 35 Medan telah berupaya menerapkan berbagai metode pembelajaran inovatif seperti project-based learning dan discovery learning, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang diawali asesmen diagnostik, mengintegrasikan nilai Profil Pelajar Pancasila secara natural, serta melaksanakan asesmen secara lebih autentik dan bermakna. Pengembangan kompetensi profesional dilakukan secara mandiri melalui berbagai platform digital dan komunitas guru yang aktif.

Namun, implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi delapan kendala utama, dengan beban administrasi yang tinggi dan minimnya pelatihan berbasis praktik sebagai permasalahan yang paling dominan. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi profesional guru tidak dapat dipisahkan dari penyediaan dukungan sistemik yang memadai. Guru yang berkomitmen tinggi pun akan terbatas dalam berinovasi apabila sistem tidak memberikan ruang dan dukungan yang dibutuhkan.

Implikasi penelitian ini mencakup tiga rekomendasi utama. Bagi guru, diharapkan terus meningkatkan kompetensi melalui komunitas belajar aktif, pemanfaatan teknologi pendidikan, dan refleksi berkelanjutan. Bagi sekolah, diharapkan menyediakan dukungan berupa fasilitas memadai, pendampingan teknis, dan alokasi waktu khusus bagi guru untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Bagi pemerintah, diharapkan melakukan penyederhanaan sistem pelaporan administrasi, meningkatkan kualitas pelatihan agar lebih berbasis praktik dan simulasi

nyata, serta mendengarkan aspirasi guru lapangan dalam penyempurnaan kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, J. (2023). Hubungan kompetensi profesional dengan kualitas modul ajar. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 13(2), 189-201. <https://ejournal.uksw.edu/scholaria>
- Angga, A., Suryana, C., Nurwahidin, M., Achmad, I. A., & Widodo, A. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5877-5886. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237>
- Annisa, F. (2024). Analisis kesiapan dan fleksibilitas guru dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmu Administrasi Perkantoran dan Pendidikan*, 8(1), 33-47.
- Daga, A. T. (2021). Makna merdeka belajar dan penguatan peran guru di sekolah dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1075-1090. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i3.1279>
- Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (Eds.). (2005). *Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do*. Jossey-Bass.
- Kemendikbudristek. (2022). *Buku panduan guru: Pengembangan kompetensi dalam implementasi Kurikulum Merdeka*. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. <https://guru.kemdikbud.go.id/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyasa, E. (2013). *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*. Remaja Rosdakarya.
- Rahman, A. (2024). Analisis kompetensi profesional guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran*, 10(1), 23-35.
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6313-6319. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3248>
- Sanjaya, W. (2021). *Perencanaan dan desain sistem pembelajaran*. Kencana Prenada Media.
- Saputra, H. (2024). Komunitas belajar sebagai strategi pengembangan kompetensi profesional guru di era Kurikulum Merdeka. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(1), 45-58.
- Shulman, L. S. (2004). *The wisdom of practice: Essays on teaching, learning, and learning to teach*. Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansyah, F., Hernawan, A. H., & Prihantini. (2022). Analisis implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah penggerak sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8248-8258. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3216>
- Suprihatiningrum, J. (2013). *Guru profesional: Pedoman kinerja, kualifikasi, dan kompetensi guru*. Ar-Ruzz Media.
- Uno, H. B. (2022). *Profesi kependidikan: Kompetensi guru dan pengembangan profesionalisme*. Bumi Aksara.
- Wulandari, S. (2023). Peran kompetensi profesional dalam keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 6(2), 112-124.